# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Djulaeka, Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Gani, A. I, Muhammad Aksa Ansar. *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023),* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 32.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Idris, F. M. *Tahapan Peradilan Pidana,* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2023).

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 2009).

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020).

Mulyana Yusep, Sitta Saraya et al, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana*, (Batam: CV Rey Media Grafika, 2025).

P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Pujayanti, A. V. P. L et al. *Hukum Acara Pidana*, (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2025).

Rasiwan, I. *Suatu Pengantar Pembuktian Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2025).

Ruba'i, M. *Hukum Pidana*, (Malang: Nedia Nusa Creative, 2015).

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003).

Saat Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan bagi Peneliti Pemula*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017). dikutip dalam Misna Ariani et al. *Metodologi Penelitian Langkah Mudah Menulis Skripsi dan Tesis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023).

Wajdi Farid et al, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Komisi Yudisial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Yudisthira, E. *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pidana Korporasi Terhadap Lembaga Pengawas Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2026).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN Grt

**Jurnal**

Adzkari, Feby and Diding Rahmat, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 14-31.

Choirunnisa, Cholqi et al., "Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti PerspektifHukum Positif Dan Hukum Islam," Ma'mal: *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 6 (2022): 529-48, https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.152.

Guntara, Peter et al, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber Terorisme Di Indonesia," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 12 (2025): 19530-19541.

Haryadi, Tobi, and Zakaria, "Eksistensi Saksi Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 2 (2024): 55-62.

Heikal, Akcaya, Suhadi, and Rosdiana, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa di Persidangan Pengadilan dalam Tindak Pidana Narkotika," *Disiplin : Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 961-978.

Herisasono, Adi, Anggraini Rosiana Efendi, and Oscha Davan Kharisma, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 292-98.

Hermanata, Jennie, Annisa Anggini Nasution, and David Nugraha Saputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Lingkungan Masyarakat," Al-Zayn : *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 311-22, https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1011.

Hidayat, David, "Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video *Closed Circuit Television* (CCTV) dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota," *JOM Fakultas Hukum* VI, no. 2 (2019): 2.

Jabbar, I, S, and Ruslan Renggong, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pengedar Narkotika melalui Media Elektronik di Polres Wajo" *Indonesian Journal of Legality of Law* 8, no. 1 (2025): 122-128 , https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7664.

Isima, Nulaila, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 186.

Kalsum, Ummu et al, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perspektif Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Comparativa* 3, no. 01 (2024): 99-121.

Murtopo, Aang Alim and Khafidz Basri, "Perancangan Aplikasi Monitoring Dan Perekamanan Kegiatan Menggunakan Kamera CCTV," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 1 (2021): 23, https://doi.org/10.36418/jist.v2i1.395.

Nope, A. A. N, Ida Bagus Anggapurana Pidada, and Ni Made Rai Sukardi, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman CCTV Sebagai Bukti Dalam Perkara Pidana," J*urnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 01-14, https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5528.

Nugroho, Bastianto, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," Yuridika 32, no. 1 (2017): 25, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780.

Nyahu, Andre Faschal Neta, and Erwin Syahruddin. "Penerapan Pasal 83 Ayat (1) Huruf B, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perspektif Penegakan Hukum Progresif." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 201–209.

Pratama, Adrian. "Peran Keuangan Digital dalam Mendeteksi dan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Elektronik." *Sumatera Barat Law Journal (SMBLJ)* 3, no. 2 (Januari 2025): 250–260.

Rusli, Tami and Aftaf Brilian Martquardo, "Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Penikahan," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 101-11, https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8904.

Saputra, Galih, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia”, *Journal Terekam Jejak* (JTJ) 3, no.2 (2025): 23-32.

Selsa Dannya Fitria et al, “Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital dalam Proses Pidana,” *Action Research Literate* 9, no. 7 (2025): 7.

Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana”, *Junral Hukum dan Peradilan* 6, no.3 (2017): 469.

Rusli, Tami and Aftaf Brilian Martquardo, “Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Penikahan,” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 02 (2021): 101-11, https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8904.

Zaini, Z D et al., “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,” *Jurnal Living Law* 15, no. 1 (2023): 86-95.

***Website***

Ave, Rafi Muhammad. *Menafsirkan Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti dalam KUHAP Baru*. MariNews Mahkamah Agung, 16 Desember 2025. Diakses melalui: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menafsirkan-pengamatan-hakim-sebagai-alat-bukti-dalam-kuhap-0GS.

Brahmana, H.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Pengadilan Negeri Lholsukon, 2016. Diakses melalui: https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, “Alat Bukti Elekrtronik Persidangan Perkara Pidana dan Perdata”, Video Youtube, 4.01 hingga 4.20, 2024, https://youtu.be/7dRwYxJW6tk?si=G2l8rP-5BAmaEbux.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Data Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2026*. Diakses melalui: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Pudjoharsoyo, Achmad Setyo. *Perdebatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dalam Menegakkan Doktrin Exclusionary Rule pada Tahap Pembuktian di Persidangan*. MariNews Mahkamah Agung, 5 Januari 2026. Diakses melalui: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perdebatan-exclusionary-rule-dalam-tahap-pembuktian-0Ke.